

Melampaui Benturan Budaya: Tinjauan Kritis atas Teori Konflik Etnis Dayak–Madura di Kalimantan dari Argumen Frank Fanselow

Muh. Nur Rahmat Yasim

Departemen Antropologi , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Correspondence author: rahmatyasim28@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Dayak, Madura, Ethnic Conflict, Kalimantan, Politic Identity

How to Cite:

Yasim, M. N. R. (2025). Melampaui Benturan Budaya: Tinjauan Kritis atas Teori Konflik Etnis Dayak–Madura di Kalimantan

ABSTRACT

This article critically reviews Frank Fanselow's explanation of Dayak–Madurese ethnic conflict in Kalimantan and situates it within broader debates on ethnic boundaries, resource competition, political transition, identity mobilization, and local institutional capacity. Using an integrative-critical literature review, it synthesizes Fanselow's article and thirteen additional academic references selected for conceptual relevance, empirical focus on Indonesia or Kalimantan, publication quality, and verifiable bibliographic records. The review finds that Fanselow's main contribution lies in treating Dayak knowledge as social theory rather than merely local data and in challenging economic reductionism. Nevertheless, the idea of a "clash of cultures" risks reifying Dayak and Madurese communities as homogeneous groups, naturalizing stereotypes, and obscuring the roles of regime transition, local elite competition, territorial control, rumors, and weakened security arrangements. The article proposes a multilevel explanatory model linking five layers: historical-structural legacies, political-institutional change, territorial-economic contestation, the production of ethnic boundaries and stereotypes, and triggering and mobilization mechanisms. This synthesis argues that culture matters as a language through which conflict is interpreted and organized, but it is not an autonomous or automatic cause. Reconciliation therefore requires recognition of local categories alongside institutional reform, rights protection, social relationship recovery, and safeguards against the political instrumentalization of identity.

1. Pendahuluan

Konflik Dayak–Madura di Kalimantan merupakan salah satu rangkaian kekerasan komunal paling penting dalam sejarah Indonesia kontemporer. Eskalasi pada 1997 di Kalimantan Barat, 1999 di Sambas, dan 2001 di Kalimantan Tengah tidak hanya menghasilkan korban jiwa dan perpindahan penduduk, tetapi juga

memunculkan pertarungan mengenai cara konflik itu seharusnya dipahami. Sejumlah penjelasan menekankan kompetisi ekonomi, ketimpangan akses terhadap pekerjaan dan tanah, lemahnya penegakan hukum, atau perubahan politik setelah runtuhnya Orde Baru. Penjelasan lain menekankan perbedaan adat, sejarah permusuhan, stereotip kekerasan, serta ketidakcocokan norma antara komunitas Dayak dan Madura.

Dalam perdebatan tersebut, artikel Frank Fanselow, “Indigenous and Anthropological Theories of Ethnic Conflict in Kalimantan,” menempati posisi khas. Fanselow (2015) tidak sekadar membandingkan beberapa teori penyebab konflik, tetapi menunjukkan adanya benturan epistemologis antara teori antropologis yang cenderung mereduksi konflik menjadi persaingan material dan teori lokal Dayak yang memahami kekerasan sebagai benturan adat dan kegagalan pihak pendatang menghormati aturan setempat. Dengan demikian, objek kajiannya bukan hanya konflik etnis, melainkan juga politik pengetahuan: siapa yang berhak mendefinisikan penyebab konflik, kategori apa yang dianggap sah, dan bagaimana penjelasan akademik kembali beredar dalam masyarakat.

Naskah awal yang menjadi dasar artikel ini telah secara tepat menangkap beberapa komponen argumen Fanselow, seperti teori konspirasi, kambing hitam, kecemburuan sosial, persaingan sumber daya, benturan budaya, dan kritik Dayak terhadap representasi antropologis. Akan tetapi, bentuk respons paper belum cukup untuk menjadi artikel ilmiah karena masih dominan deskriptif, belum memiliki metode review, belum membandingkan argumen dengan literatur utama, dan belum merumuskan kontribusi teoretis yang mandiri. Artikel ini karena itu mengembangkan naskah tersebut menjadi tinjauan kritis yang mengajukan pertanyaan: sejauh mana perspektif emik yang dibela Fanselow memperbaiki penjelasan konflik, dan pada titik mana perspektif itu justru berisiko menghasilkan determinisme budaya baru?

Argumen utama artikel ini adalah bahwa kontribusi Fanselow harus dipertahankan pada level epistemologis—yakni pengakuan bahwa masyarakat lokal menghasilkan teori tentang pengalaman mereka sendiri—tetapi tidak boleh diterima sebagai penjelasan kausal tunggal. Konflik Dayak–Madura lebih tepat dipahami melalui model relasional dan multilevel. Kebudayaan menyediakan simbol, kategori moral, ingatan, dan stereotip yang memungkinkan kekerasan dibingkai sebagai tindakan kolektif. Namun, aktivasi kategori tersebut bergantung pada perubahan institusi, konfigurasi elite, ketidakpastian keamanan, kontestasi wilayah, dan mekanisme mobilisasi.

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan integrative critical review. Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai systematic review kuantitatif atau meta-analisis, melainkan sebagai sintesis argumentatif atas karya-karya yang mewakili teori utama dan temuan empiris paling relevan. Unit analisisnya adalah proposisi teoretis, mekanisme kausal, bentuk penggunaan konsep etnisitas, dan posisi penulis terhadap hubungan antara kebudayaan, politik, ekonomi, dan institusi.

Korpus utama terdiri atas artikel Fanselow (2015) dan tiga belas sumber tambahan. Pemilihan dilakukan berdasarkan empat kriteria: (1) relevansi langsung dengan konflik Dayak-Madura atau kekerasan komunal Indonesia; (2) kontribusi terhadap teori batas etnis, konstruksi identitas, kerusakan etnis, transisi demokrasi, dan institusi keamanan; (3) publikasi melalui jurnal internasional atau penerbit akademik bereputasi; dan (4) metadata yang dapat diverifikasi melalui DOI atau katalog penerbit. Literatur terbaru mengenai pergeseran identitas Dayak juga digunakan untuk menghubungkan kekerasan masa lalu dengan institusionalisasi politik identitas pada periode pascakonflik.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, setiap karya dipetakan menurut unit penjelasannya: budaya, identitas, sumber daya, institusi, elite, atau transisi politik. Kedua, kekuatan dan keterbatasan tiap pendekatan dibandingkan, terutama dalam menjelaskan perbedaan waktu, lokasi, skala, dan intensitas kekerasan. Ketiga, hasil perbandingan disusun menjadi model sintesis multilevel. Keterbatasan review ini adalah jumlah sumber yang sengaja dibatasi dan tidak mencakup seluruh literatur berbahasa Indonesia, laporan organisasi, arsip media, atau kesaksian korban. Karena itu, artikel ini menawarkan kerangka konseptual untuk penelitian lanjutan, bukan klaim final mengenai seluruh fakta konflik.

Tabel 1. Peta Literatur dan Posisi Analitis

Sumber	Fokus	Kontribusi Utama	Catatan Kritis
Barth (1969)	Batas etnis	Etnisitas diproduksi melalui batas sosial, bukan isi budaya yang tetap.	Kurang menjelaskan eskalasi kekerasan dan peran negara.
Horowitz (1985)	Konflik etnis	Menjelaskan afeksi kelompok, perbandingan status, dan logika kerusakan etnis.	Berisiko terlalu umum untuk variasi lokal Kalimantan.
Fearon & Laitin (2000)	Konstruksi identitas	Kekerasan dapat membentuk dan mengeraskan identitas yang sebelumnya lebih lentur.	Memerlukan data prosedural rinci untuk menguji mekanisme.
Brubaker (2004)	Kritik groupism	Menghindari asumsi bahwa kelompok etnis selalu kompak dan bertindak sebagai satu aktor.	Tidak secara khusus membahas Kalimantan.
Davidson (2003)	Politik kekerasan lokal	Menghubungkan kekerasan di Kalimantan Barat dengan elite, institusi, dan perubahan politik.	Fokus regional tidak sepenuhnya menjelaskan Sampit.

Sumber	Fokus	Kontribusi Utama	Catatan Kritis
Schiller & Garang (2002)	Agama dan etnis	Menunjukkan bahwa batas agama tidak cukup menjelaskan konflik Dayak–Madura.	Masih terbatas pada pembacaan awal pascakonflik.
Bouvier & Smith (2006)	Rumor dan teori konspirasi	Membedah framing spontanitas, konspirasi, dan ketidakpastian pengetahuan di Kalimantan Tengah.	Sulit memverifikasi sebagian klaim aktor.
van Klinken (2007)	Demokratisasi dan kota kecil	Kekerasan komunal terkait kompetisi elite menengah dalam transisi pasca-Orde Baru.	Model elite perlu dipadukan dengan sejarah lokal.
Bertrand (2008)	Critical junctures	Waktu kekerasan dipengaruhi retaknya model nasional dan momen transisi politik.	Penjelasan makro perlu mekanisme mikro.
Peluso (2008)	Ekologi politik dan wilayah	Territory, land, and historical geographies shape participation and forms of violence.	Tidak cukup menangkap seluruh dimensi simbolik.
Aspinall (2011)	Demokratisasi dan etnopolitik	Demokrasi tidak otomatis menghapus etnisitas; ia mengubah arena dan insentif mobilisasi.	Fokus Indonesia luas, bukan khusus konflik Dayak–Madura.
Tajima (2014)	Institusi ketertiban komunal	Ketergantungan pada represi negara dapat meningkatkan kerentanan ketika rezim melemah.	Perlu pengujian lebih spesifik pada tiap lokasi konflik.
Fanselow (2015)	Teori lokal dan antropologis	Mengakui teori Dayak dan mengkritik reduksionisme serta imperialisme kategori akademik.	Berisiko mereifikasi budaya dan mengabaikan heterogenitas internal.
Haridison et al. (2024)	Pergeseran identitas Dayak	Identitas Dayak bergeser menuju bentuk politik dan kelembagaan yang lebih terorganisasi.	Tidak membahas langsung mekanisme kekerasan 1997–2001.

Sumber: disusun oleh penulis berdasarkan literatur yang direview.

3. Hasil dan Pembahasan

Dari Kebudayaan sebagai Isi menuju Etnisitas sebagai Relasi

Salah satu masalah dasar dalam penjelasan konflik etnis adalah kecenderungan memperlakukan kelompok sebagai entitas alami yang telah memiliki sifat tetap sebelum konflik. Dalam kerangka ini, Dayak dan Madura mudah digambarkan sebagai dua kebudayaan yang pada dasarnya tidak kompatibel. Barth (1969) menawarkan koreksi penting: yang membuat suatu kelompok etnis bertahan bukanlah daftar isi budaya yang tidak berubah, melainkan pemeliharaan batas sosial antara “kita” dan “mereka”. Isi budaya dapat berubah, tetapi kategori keanggotaan, aturan interaksi, dan penanda pembeda tetap diproduksi dalam hubungan sosial.

Perspektif tersebut mengubah pertanyaan penelitian. Alih-alih bertanya apakah carok atau adat Dayak secara inheren menyebabkan konflik, analisis perlu menelusuri kapan praktik tertentu dijadikan simbol seluruh kelompok, siapa yang menyebarkan generalisasi itu, dan dalam situasi apa batas etnis menjadi lebih

menentukan daripada kelas, agama, profesi, atau hubungan bertetangga. Fearon dan Laitin (2000) memperkuat arah ini dengan menunjukkan bahwa kekerasan bukan sekadar akibat identitas, tetapi dapat menjadi proses yang membangun identitas. Setelah kekerasan terjadi, pengalaman kehilangan, pengungsian, rumor, dan ingatan kolektif mengeraskan kategori kelompok dan membuat narasi permusuhan tampak seolah-olah telah ada sejak dahulu.

Brubaker (2004) menyebut kecenderungan untuk membayangkan kelompok sebagai aktor yang kompak sebagai groupism. Kritik ini sangat relevan terhadap pembacaan “benturan budaya”. Tidak semua orang Dayak memiliki pengalaman, posisi politik, agama, kelas, dan kepentingan yang sama; demikian pula komunitas Madura tidak dapat direduksi menjadi satu tipe ekonomi atau karakter moral. Ketika tulisan akademik mengulang kategori homogen, tulisan itu dapat tanpa sengaja mereproduksi logika konflik yang sedang dianalisis. Karena itu, kategori Dayak dan Madura harus diperlakukan sebagai kategori praktik yang digunakan aktor, sekaligus kategori analisis yang perlu terus diperiksa.

Horowitz (1985) tetap penting karena menunjukkan bahwa konflik etnis memiliki dimensi afektif: rasa takut, penghinaan, kecemasan status, dan persepsi ancaman tidak dapat direduksi menjadi kalkulasi material. Namun, emosi kolektif juga tidak muncul dari sifat budaya yang tetap. Ia dibentuk oleh pengalaman historis, perbandingan antarkelompok, rumor, dan tindakan organisasi. Dengan menggabungkan Barth, Fearon–Laitin, Brubaker, dan Horowitz, kebudayaan dapat dipahami bukan sebagai mesin penyebab yang otomatis, tetapi sebagai repertoar simbolik yang diaktifkan dalam hubungan sosial tertentu.

Kontribusi Fanselow: Mengakui Teori Lokal sebagai Pengetahuan

Kontribusi paling kuat dari Fanselow (2015) adalah penolakannya terhadap hierarki epistemik yang menempatkan antropolog sebagai produsen teori dan masyarakat lokal sebagai penyedia data. Bagi Fanselow, penjelasan Dayak mengenai adat, penghormatan terhadap otoritas lokal, dan ketidakcocokan norma harus dibaca sebagai teori sosial yang memiliki logika, sejarah, dan kritiknya sendiri. Posisi ini penting karena masyarakat Dayak lama direpresentasikan melalui citra primitif, headhunter, atau objek pembangunan. Dalam konteks tersebut, penolakan terhadap penjelasan ekonomi bukan sekadar perdebatan akademik, tetapi juga respons terhadap sejarah panjang penyederhanaan oleh negara, media, dan peneliti luar.

Fanselow juga tepat mengkritik penjelasan kompetisi sumber daya ketika teori itu digunakan terlalu cepat. Klaim bahwa dua kelompok miskin berkonflik karena pekerjaan atau tanah belum menjelaskan mengapa persaingan berubah menjadi

serangan berbasis identitas, mengapa korban dipilih berdasarkan kategori etnis, atau mengapa kekerasan meledak pada waktu tertentu. Kompetisi ekonomi adalah kondisi yang mungkin meningkatkan ketegangan, tetapi bukan mekanisme lengkap. Penjelasan material harus menunjukkan proses perantara: pembingkai ketidakadilan, organisasi pelaku, kegagalan hukum, distribusi rumor, dan legitimasi moral kekerasan.

Selain itu, Fanselow membuka ruang reflektivitas bagi antropologi. Teori akademik tidak berhenti di universitas; ia dapat beredar melalui media, aktivis, birokrasi, dan percakapan publik, lalu menjadi bagian dari konflik mengenai representasi. Ketika masyarakat Dayak menolak teori “kecemburuan ekonomi”, mereka juga menolak posisi sebagai kelompok yang dianggap tertinggal dan irasional. Dengan demikian, pengetahuan tentang konflik merupakan arena kuasa. Analisis yang baik harus memeriksa bukan hanya apakah suatu teori benar, tetapi juga konsekuensi sosial ketika teori itu dilekatkan pada kelompok tertentu.

Keterbatasan Perspektif Benturan Budaya

Meskipun bernilai secara epistemologis, teori benturan budaya memiliki empat keterbatasan. Pertama, teori ini cenderung mengubah stereotip menjadi penjelasan. Praktik carok, misalnya, dapat digunakan untuk membangun gambaran bahwa orang Madura memiliki disposisi kekerasan yang seragam. Masalahnya bukan hanya ketidakakuratan empiris, tetapi juga sirkularitas: konflik dijelaskan oleh budaya kekerasan, sedangkan bukti budaya kekerasan diambil dari fakta bahwa konflik terjadi. Penjelasan semacam ini tidak mampu menerangkan mengapa mayoritas interaksi Dayak–Madura dalam waktu dan tempat lain tidak selalu berakhir dengan kekerasan.

Kedua, benturan budaya mengaburkan diferensiasi internal. Identitas Dayak mencakup keragaman subkelompok, agama, wilayah, organisasi adat, generasi, dan posisi kelas. Identitas Madura juga dibentuk oleh variasi asal, lama migrasi, pekerjaan, jaringan kekerabatan, serta hubungan dengan warga lokal. Brubaker (2004) mengingatkan bahwa kohesi kelompok sering kali merupakan hasil kerja organisasi dan peristiwa, bukan kondisi awal. Karena itu, penelitian perlu mengidentifikasi aktor yang mengklaim berbicara atas nama kelompok, sumber otoritasnya, dan kelompok internal yang suaranya tersisih.

Ketiga, teori budaya sulit menjelaskan timing. Jika perbedaan adat telah lama ada, mengapa eskalasi besar terkonsentrasi pada akhir Orde Baru dan awal Reformasi? Bertrand (2008) menunjukkan pentingnya critical junctures, yaitu momen ketika aturan politik lama melemah, model nasional diperdebatkan, dan klaim kelompok memperoleh peluang baru. Van Klinken (2007) menempatkan

kekerasan komunal dalam kompetisi elite lokal di kota-kota menengah selama demokratisasi dan desentralisasi. Aspinall (2011) menambahkan bahwa demokratisasi tidak menghilangkan etnisitas; ia mengubah insentif, organisasi, dan arena penggunaan identitas. Faktor-faktor ini menjelaskan mengapa perbedaan budaya menjadi lebih mudah dimobilisasi pada periode tertentu.

Keempat, teori benturan budaya kurang memperhatikan institusi ketertiban. Tajima (2014) menunjukkan bahwa rezim otoriter dapat menciptakan ketergantungan komunitas pada aparat negara. Ketika kontrol pusat melemah, daerah yang tidak memiliki mekanisme informal yang kuat untuk mengelola ketegangan menjadi lebih rentan. Di Kalimantan Tengah, teori konspirasi dan kecurigaan terhadap aparat yang dibahas Bouvier dan Smith (2006) mencerminkan ketidakpastian mengenai siapa yang mengendalikan kekerasan dan mengapa negara gagal menghentikannya. Ketidakpastian ini bukan latar pasif; ia memengaruhi keputusan warga untuk melindungi diri, mengikuti mobilisasi, atau mempercayai rumor.

Politik, Wilayah, dan Mekanisme Mobilisasi

Davidson (2003) memperlihatkan bahwa kekerasan di Kalimantan Barat tidak dapat dipisahkan dari perubahan konfigurasi kekuasaan lokal. Konflik etnis berinteraksi dengan kompetisi birokrasi, organisasi sosial, aktor keamanan, dan elite yang berusaha memperoleh legitimasi. Perspektif ini tidak berarti bahwa elite secara tunggal “menciptakan” konflik. Mobilisasi hanya efektif ketika tersedia keluhan, jaringan, simbol, dan pengalaman historis yang dapat diaktifkan. Namun, penekanan pada politik lokal memperbaiki teori budaya karena menunjukkan aktor, kepentingan, dan organisasi yang mengubah perbedaan menjadi tindakan kolektif.

Peluso (2008) menambahkan dimensi teritorial. Wilayah bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan ruang historis yang memuat klaim kepemilikan, asal-usul, hak adat, dan pengalaman pengusiran. Dalam perspektif ekologi politik, tanah dan teritori menghubungkan ekonomi dengan identitas. Persaingan terhadap lahan, kontrol pasar, atau akses pekerjaan menjadi etnis ketika dibaca melalui narasi siapa yang lebih dahulu hadir, siapa yang dianggap tamu, siapa yang menaati adat, dan siapa yang memperoleh perlindungan negara. Karena itu, dikotomi antara penjelasan ekonomi dan budaya sebenarnya menyesatkan: sumber daya memperoleh makna melalui kategori budaya, sementara kategori budaya memperoleh daya material melalui kontrol terhadap wilayah dan institusi.

Schiller dan Garang (2002) menunjukkan bahwa agama tidak memetakan konflik secara sederhana. Kehadiran Dayak Muslim dan hubungan lintas agama

membuat tesis konflik Kristen–Muslim tidak memadai. Fakta ini penting karena identitas yang aktif dalam konflik selalu bersifat selektif. Aktor dapat menonjolkan etnisitas, agama, asal daerah, atau status pendatang sesuai dengan konteks. Pertanyaan analitis bukan identitas mana yang paling “asli”, tetapi mekanisme apa yang membuat satu identitas menjadi paling menonjol dalam suatu episode.

Bouvier dan Smith (2006) mengingatkan bahwa kekerasan juga dibentuk oleh rumor dan teori konspirasi. Rumor mengisi kekosongan informasi ketika kepercayaan terhadap negara rendah. Ia menyederhanakan peristiwa kompleks menjadi cerita tentang dalang, pengkhianatan, atau ancaman tersembunyi. Cerita tersebut dapat memobilisasi ketakutan bahkan ketika bukti tidak tersedia. Dengan demikian, rumor bukan sekadar informasi palsu; ia adalah bentuk pengetahuan sosial yang tumbuh dalam struktur ketidakpercayaan. Analisis konflik perlu menelusuri saluran penyebaran, otoritas penyampai, dan tindakan yang dilegitimasi oleh rumor.

Model Sintesis Multilevel

Berdasarkan literatur yang direview, konflik Dayak–Madura lebih tepat dijelaskan melalui lima lapisan yang saling berhubungan. Lapisan pertama adalah warisan historis-struktural. Migrasi, transmigrasi, perubahan ekonomi regional, kebijakan kehutanan dan pertanian, serta sejarah representasi kolonial dan nasional membentuk distribusi penduduk, akses sumber daya, dan hierarki simbolik. Lapisan ini menghasilkan kondisi ketimpangan dan memori kolektif, tetapi tidak dengan sendirinya menyebabkan kekerasan.

Lapisan kedua adalah perubahan politik-institusional. Runtuhnya Orde Baru, desentralisasi, reorganisasi aparat, dan kompetisi jabatan lokal menciptakan ketidakpastian serta peluang mobilisasi. Bertrand (2008), van Klinken (2007), Aspinall (2011), dan Tajima (2014) menunjukkan bahwa transisi politik memengaruhi waktu, skala, dan kemampuan institusi mencegah eskalasi. Pada lapisan ini, konflik menjadi mungkin karena mekanisme kontrol lama melemah sementara aturan baru belum stabil.

Lapisan ketiga adalah kontestasi teritorial-ekonomi. Persaingan atas tanah, pekerjaan, perdagangan, transportasi, dan akses negara menjadi penting ketika dihubungkan dengan klaim asal-usul dan hak moral atas wilayah. Peluso (2008) menunjukkan bahwa geografi historis menentukan siapa yang dianggap memiliki otoritas atas ruang. Materialitas dan simbolisme karena itu harus dianalisis bersama, bukan dipertentangkan.

Lapisan keempat adalah produksi batas dan stereotip etnis. Melalui narasi adat, carok, keberanian, kerja keras, kecemburuan, atau status pendatang, aktor

mendefinisikan siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang dianggap mengancam. Barth (1969), Fearon dan Laitin (2000), serta Brubaker (2004) membantu melihat bahwa batas tersebut diproduksi, dipelihara, dan diperkeras oleh peristiwa. Fanselow (2015) penting karena menunjukkan bahwa kategori lokal mempunyai daya penjelas dan legitimasi, tetapi kategori itu tetap harus diperiksa sebagai bagian dari proses politik.

Lapisan kelima adalah mekanisme pemicu dan mobilisasi. Insiden interpersonal, rumor, pembunuhan, kegagalan aparat, pidato elite, atau pergerakan massa dapat mengubah ketegangan menjadi kekerasan kolektif. Pemicu bukan penyebab dasar, tetapi titik yang menghubungkan struktur dengan tindakan. Pada tahap ini, jaringan organisasi, emosi, ketakutan, dan ekspektasi mengenai perilaku kelompok lain menentukan apakah warga menghindar, bertahan, membalas, atau ikut menyerang.

Model ini menolak dua penyederhanaan. Pertama, konflik bukan akibat otomatis dari perbedaan budaya. Kedua, konflik juga bukan konsekuensi mekanis dari kemiskinan atau persaingan ekonomi. Kekerasan muncul ketika kondisi struktural, peluang politik, klaim teritorial, batas identitas, dan mekanisme mobilisasi bertemu. Variasi antarlokasi dapat dijelaskan dengan menilai konfigurasi masing-masing lapisan, bukan dengan mencari satu sebab universal.

Pascakonflik, Institusionalisasi Identitas, dan Rekonsiliasi

Literatur terbaru menunjukkan bahwa berakhirnya kekerasan tidak berarti hilangnya politik identitas. Haridison et al. (2024) menemukan bahwa identitas Dayak mengalami pergeseran menuju bentuk yang lebih terorganisasi melalui adat dan politik elektoral. Temuan ini penting untuk membaca warisan konflik. Identitas dapat berpindah dari mobilisasi kekerasan ke arena institusional, tetapi proses tersebut memiliki dua kemungkinan. Di satu sisi, penguatan lembaga adat dapat memperluas representasi, perlindungan hak, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Di sisi lain, institusionalisasi dapat menghasilkan eksklusivisme baru apabila klaim keaslian digunakan untuk membatasi kewargaan atau akses kelompok lain.

Rekonsiliasi karena itu tidak cukup dilakukan melalui seruan harmoni atau festival budaya. Pertama, pengakuan terhadap kategori dan mekanisme lokal perlu disertai prinsip kesetaraan hak. Adat tidak boleh digunakan untuk melegitimasi hukuman kolektif atau stereotip. Kedua, institusi keamanan dan peradilan harus mampu menangani insiden individual secara cepat agar pelanggaran tidak ditransformasikan menjadi kesalahan kelompok. Ketiga, penyelesaian sengketa

tanah, pekerjaan, dan akses pelayanan harus transparan karena ketidakadilan material mudah diterjemahkan menjadi narasi etnis.

Keempat, rekonsiliasi memerlukan ruang untuk memproses ingatan konflik tanpa mengabadikan identitas korban dan pelaku sebagai sifat turun-temurun. Pendekatan yang hanya menekankan “budaya damai” berisiko menutupi kehilangan, pengungsian, dan ketimpangan yang belum selesai. Sebaliknya, pendekatan yang hanya menekankan trauma dapat membuat batas kelompok terus membeku. Kebijakan harus mendorong kerja sama sehari-hari, representasi lintas kelompok, pendidikan sejarah yang tidak menstigma, serta mekanisme peringatan dini terhadap rumor dan mobilisasi kebencian.

Kelima, penelitian pascakonflik perlu turun ke tingkat relasi sosial mikro. Data agregat tentang komposisi etnis tidak cukup untuk memahami siapa yang membangun kembali pasar, sekolah, jaringan kerja, perkawinan, atau organisasi warga. Studi etnografi dapat menelusuri bagaimana kategori Dayak dan Madura dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari, kapan identitas menjadi relevan, dan kapan ia dikalahkan oleh hubungan kelas, agama, profesi, atau kedekatan personal.

4. Kesimpulan

Tinjauan ini menunjukkan bahwa artikel Fanselow memberikan koreksi penting terhadap kecenderungan antropologi menjadikan pengetahuan lokal sebagai data tanpa status teoretis. Penolakan masyarakat Dayak terhadap reduksionisme ekonomi harus dipahami sebagai kritik terhadap sejarah representasi, ketimpangan epistemik, dan kegagalan penjelasan luar menangkap kategori moral setempat. Dalam hal ini, Fanselow memperluas antropologi konflik dengan menempatkan teori lokal sebagai bagian dari perdebatan ilmiah.

Namun, pengakuan tersebut tidak boleh berakhir pada penerimaan literal atas tesis benturan budaya. Ketika kebudayaan diperlakukan sebagai paket nilai yang seragam, analisis berisiko mengulang stereotip, menutupi heterogenitas internal, dan gagal menjelaskan waktu serta variasi kekerasan. Literatur komparatif dan studi Kalimantan menunjukkan bahwa konflik terbentuk melalui hubungan antara warisan sejarah, transisi politik, kapasitas institusi, kontestasi wilayah, produksi batas etnis, rumor, dan mobilisasi aktor.

Kontribusi artikel ini adalah model multilevel yang menempatkan kebudayaan sebagai bahasa dan repertoar konflik, bukan penyebab tunggal. Model tersebut mempertahankan sensitivitas emik yang ditekankan Fanselow sekaligus menghindari determinisme budaya. Secara praktis, kerangka ini mengarahkan rekonsiliasi pada dua pekerjaan yang harus berjalan bersamaan: pengakuan

terhadap otoritas dan pengetahuan lokal, serta pembangunan institusi yang menjamin hak, keadilan, keamanan, dan interaksi lintas kelompok.

Referensi

- Aspinall, E. (2011). Democratization and ethnic politics in Indonesia: Nine theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319. <https://doi.org/10.1017/S1598240800007190>
- Barth, F. (Ed.). (1969). *Ethnic groups and boundaries: The social organization of culture difference*. Little, Brown and Company.
- Bertrand, J. (2008). Ethnic conflicts in Indonesia: National models, critical junctures, and the timing of violence. *Journal of East Asian Studies*, 8(3), 425–449. <https://doi.org/10.1017/S1598240800006494>
- Bouvier, H., & Smith, G. (2006). Of spontaneity and conspiracy theories: Explaining violence in Central Kalimantan. *Asian Journal of Social Science*, 34(3), 475–491. <https://doi.org/10.1163/156853106778048678>
- Brubaker, R. (2004). *Ethnicity without groups*. Harvard University Press.
- Davidson, J. S. (2003). The politics of violence on an Indonesian periphery. *South East Asia Research*, 11(1), 59–89. <https://doi.org/10.5367/000000003101297142>
- Fanselow, F. (2015). Indigenous and anthropological theories of ethnic conflict in Kalimantan. *Zinbun*, 45, 131–147. <https://doi.org/10.14989/197513>
- Fearon, J. D., & Laitin, D. D. (2000). Violence and the social construction of ethnic identity. *International Organization*, 54(4), 845–877. <https://doi.org/10.1162/002081800551398>
- Haridison, A., Yuwanto, Alfirdaus, L. K., & Wijayanto. (2024). The shifting identity of the Dayak in Indonesia. *Asian Affairs: An American Review*, 51(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/00927678.2023.2262356>
- Horowitz, D. L. (1985). *Ethnic groups in conflict*. University of California Press.
- Peluso, N. L. (2008). A political ecology of violence and territory in West Kalimantan. *Asia Pacific Viewpoint*, 49(1), 48–67. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8373.2008.00360.x>
- Schiller, A., & Garang, B. (2002). Religion and inter-ethnic violence in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 32(2), 244–254. <https://doi.org/10.1080/00472330280000151>
- Tajima, Y. (2014). *The institutional origins of communal violence: Indonesia's transition from authoritarian rule*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139235716>
- van Klinken, G. (2007). *Communal violence and democratization in Indonesia: Small town wars*. Routledge.